

Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Menolak Kebijakan Neoliberal di Pesisir Selatan Kulon Progo

Eka Zuni Lusi Astuti

University of Limerick, Irlandia

e-mail: Eka.Astuti@ul.ie

Abstrak

*Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT Jogja Magasa Iron mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi kepada masyarakat pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada pertengahan tahun 2006 silam. Petani lahan pantai menolak rencana penambangan tersebut karena penambangan akan merampas lahan pertanian mereka yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghidupan. Penambangan juga akan merusak ekosistem pesisir. Pada tahun 2007, petani lahan pantai mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai-Kulon Progo (PPLP-KP) untuk menghimpun kekuatan petani melawan rencana penambangan. PPLP-KP melakukan perlawanan terbuka (*overt resistance*) seperti berdemonstrasi, memasang poster-poster perlawanan di wilayah pesisir, berdoa secara masal (*mujahadah*), dan memboikot pilot proyek pabrik pasir besi di wilayah pesisir. Perlawanan tertutup (*hidden transcript*) juga dilakukan, seperti mengeksklusi warga pesisir yang mendukung rencana penambangan pasir besi. Pada tahun 2014, pemerintah menunda rencana penambangan tersebut tanpa kejelasan. Sampai saat ini, PPLP-KP tetap Bersatu menolak rencana penambangan dan semua aktivitas yang berpotensi merampas lahan pertaniannya. Perlawanan PPLP ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ekstraktivisme yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor bisnis. Perlawanan tersebut merefleksikan premis kelima teori David Harvey dimana *Accummulation by Dispossession* yang mendorong perlawanan. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana PPLP-KP mempertahankan perlawanannya selama 18 tahun.*

Kata kunci: perlawanan petani, neoliberalisme, ekstraktivisme, *Accummulation by Dispossession*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendapat predikat sebagai negara ekstraktif (*extractivist state*) karena sistem ekonomi dan model produksinya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan ekstraktif yang masif. Bagaikan dua sisi mata uang, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah-ruah membawa keberuntungan sekaligus mendatangkan berbagai tantangan. Keberuntungan tersebut berupa melimpahnya pendapatan dari hasil eksplorasi sumber daya alam dan keunggulan komparatif pada sektor pertanian. Selain itu, pemerintah mendapatkan banyak keuntungan dari penyewaan sumber daya alam (*natural resource rents*). Maka, pendapatan dari sektor ekstraktif berkontribusi besar pada pendapatan nasional. Di sisi lain, tantangan hadir ketika pemerintah membuka seluas-luasnya pintu bagi investasi asing untuk mengeksploitasi SDA Indonesia. Investasi tentunya membawa keuntungan bagi negara, investor, pengusaha, dan membawa multiplier efek bagi masyarakat sekitarnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu komunitas lokal sehingga menuai perlawanan. Sebagian besar kasus perlawanan komunitas akar rumput terhadap eksploitasi SDA

berupa konflik agraria. Bentuk-bentuk eksploitasi SDA yang merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya disebut sebagai ekstraktifisme (*ekstraktivism*). Ekstraktivisme mengacu pada sistem penindasan, kekerasan, penipisan sumber daya, dan non-timbal balik yang didukung dan dibenarkan oleh jaringan praktik, mentalitas, dan perbedaan kekuasaan yang saling terkait (Chagnon dkk. 2022).

Proses ekonomi ekstraktif di Indonesia dapat dikaji dari ekonomi politik Indonesia sejak zaman kolonial. Secara umum, ekonomi politik Indonesia terdiri dari empat era yaitu era kolonial, era milik negara (*state owned*), era marketisasi, dan era demokratisasi. Ekonomi ekstraktif Indonesia didirikan dan dipupuk sejak zaman kolonial. Menggunakan merkantilisme, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menerapkan ekonomi ekstraktif murni dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah pada tahun 1800-1900. Ekonomi ekstraktif dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui sistem ekstraktif modern dengan menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1815-1830. Oleh karena itu, ekonomi politik Indonesia mewarisi sifat kolonial, seperti ekspor yang didominasi oleh bahan baku, impor yang didominasi oleh barang-barang konsumsi, dan pasar keuangan yang digunakan oleh investor asing untuk memutar kelebihan modal mereka (Baswir 2009). Sifat kolonial ekonomi politik diterapkan pada era marketisasi dan era demokratisasi. Pemerintah menjalankan liberalisme dan neoliberalisme seperti mengundang modal asing dan bersandar pada pinjaman luar negeri.

Sumber daya alam Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Investasi sumber daya alam memberikan manfaat bagi investor, negara, dan membawa multiplier effect bagi masyarakat. Namun, eksploitasi sumber daya alam juga menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat setempat, sehingga mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Ada begitu banyak kasus di mana masyarakat lokal memerangi eksploitasi sumber daya alam di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kulon Progo dimana serikat petani bernama PPLP menolak rencana penambangan pasir besi. Rencana penambangan ini digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Jogja Magasa Iron, Ltd (PT JMI). Pada 2006, mereka mensosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat pesisir. Pada saat yang sama, masyarakat pesisir, khususnya petani pesisir, menolak rencana penambangan tersebut. Pasalnya, pertambangan akan mengambil alih lahan pesisir sebagai sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan rencana kontrak karya penambangan besi, luas konsesi pertambangan pasir besi mencapai 2.987,79 hektar, meliputi Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur, Bugel, Plered, dan Garongan di Kecamatan Panjatan, dan Karangwuni di Kecamatan Wates. Daerah tersebut merupakan pantai yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani dan memelihara ternak. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat pesisir menolak rencana tersebut. Pemerintah melanjutkan proyek tersebut, memicu perlawanan dari masyarakat pesisir.

Konflik muncul karena perbedaan kepentingan penggunaan lahan pesisir antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Menurut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lahan pesisir memiliki potensi sumber daya alam pasir besi berdaya jual tinggi. Dengan demikian, jika pasir besi ditambang dan diolah di Kabupaten Kulon Progo, maka akan mendongkrak pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan, dan mendorong perkembangan ekonomi Kulon Progo. Sebaliknya, para petani pesisir menolak keras rencana tersebut untuk mempertahankan sumber mata pencaharian mereka. Pengalaman sejarah juga mendukung penolakan tersebut. Pertama, para petani pesisir telah bekerja keras sejak tahun 1984 untuk mengubah lahan pantai yang tandus menjadi lahan pertanian produktif. Kedua, para petani pesisir

tidak mengakui tanah pesisir sebagai Paku Alam Ground (PAG) yakni tanah milik Paku Alam (bagian dari keluarga kerajaan Yogyakarta). Menurut masyarakat pesisir, tanah pesisir adalah tanah negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, tanah tersebut berpotensi menjadi milik perorangan setelah lebih dari 20 tahun digarap oleh masyarakat. Para petani pesisir percaya bahwa tanah pesisir adalah milik mereka meskipun mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa pemilik tanah adalah Paku Alam.

Selanjutnya, pada tahun 2007 para petani pesisir mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Penolakan tersebut semakin kuat pasca berdirinya PPLP yang mengorganisir para petani pesisir untuk memerangi pemerintah melalui aksi protes, demonstrasi, melakukan eklusi sosial terhadap warga yang pro rencana penambangan, memboikot beberapa program pemerintah, dan melakukan doa bersama (mujahadah). Mereka juga membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil akar rumput, LSM, akademisi, dan jurnalis untuk mengadvokasi perjuangan mereka. Konflik meningkat selama 2010 – 2012, di mana awalnya merupakan konflik vertikal, kemudian menjadi konflik horizontal. Seiring waktu, konflik telah menciptakan disintegrasi sosial dan mengkerdilkan norma-norma sosial di wilayah pesisir.

Penolakan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi merupakan salah satu praktik terbaik gerakan akar rumput di Indonesia. Konflik berakhir sekitar tahun 2014 ketika rencana penambangan pasir besi ditunda dan masih belum jelas sampai saat ini. Namun, PPLP terus berjuang. Mereka memperingati hari lahir PPLP setiap tahun untuk menunjukkan eksistensinya menolak perampasan ruang hidup, membangun jaringan dengan serikat petani lain dan mengadvokasi kasus yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana PPLP mempertahankan perlawanannya.

b. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan dan menambah landasan penelitian sarjana (skripsi) dan pascasarjana saya (tesis) mengenai konflik rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Penelitian sarjana saya pada tahun 2010 memetakan pro dan kontra aktor dan minat mereka pada rencana penambangan besi pasir, dinamika, dan bentuk konflik. Sementara itu, penelitian pascasarjana saya pada tahun 2012 mengeksplorasi konstruksi konflik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Resistensi petani adalah masalah sosial klasik di banyak bagian dunia. Sebagian besar berupa gerakan sosial akar rumput untuk mempertahankan mata pencaharian mereka atau melindungi mode produksi dari modernisasi. PPLP, dalam konteks konflik rencana penambangan pasir besi, terbukti tangguh untuk mempertahankan perlawanan mereka. Sangat penting untuk menguraikan bagaimana perjuangan para petani memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana PPLP mempertahankan perlawanannya selama 18 tahun? Penelitian ini akan memperkaya studi perlawanan petani terhadap rezim ekstraktif dalam konteks ekonomi politik Indonesia, khususnya di Asia Tenggara. Selanjutnya, hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan perlawanan petani untuk mendukung hak-hak petani.

c. Kajian Teoritik

Kerangka kerja (*theoretical framework*) penelitian ini menggunakan teori akumulasi dengan perampasan (*Accummulation by Dispossession*) atau disingkat ABD dan teori perlawanan

(*resistance*). Perlawanan petani di akar rumput sering kali dilihat sebagai fenomena praksis yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Namun demikian, fenomena tersebut dipengaruhi oleh fenomena global dengan lingkup yang sangat luas, salah satunya adalah globalisasi dan neoliberalisme. Oleh sebab itu, perlawanan petani yang dilakukan oleh PPLP-KP penting dipahami menggunakan perspektif ekonomi politik yang dapat mengantarkan kepada kerangka mengapa potensi perampasan tanah terjadi dan apa dampaknya. Kajian teoritik ini mencoba menelaah konsepsi-konsepsi ekonomi politik yang dapat menjelaskan munculnya perlawanan petani di akar rumput. Kondisi ekonomi politik di Indonesia akan dilihat menggunakan perspektif akumulasi dengan perampasan (ABD) yang kemudian mengantarkan pada konseptualisasi perlawanan sebagai respon terhadap dominasi elit global.

Accummulation by Dispossession

Accummulation by Dispossession (akumulasi dengan perampasan) disingkat ABD merupakan konsep yang menjelaskan kapitalisme neoliberal yang dihasilkan dari sentralisasi kekayaan dan kekuasaan para elite yang didapatkan dengan cara merampas kekayaan atau tanah sektor publik maupun sektor privat. Konsep ini dicetuskan oleh seorang ahli geografi beraliran Marxist bernama David Harvey. Harvey (2003) melakukan penelusuran mendalam terhadap diskursus kapitalisme dengan menggunakan konsep dari Rosa Luxemburgh tentang disposisi ganda pada akumulasi kapital (*the dual disposition of capital accumulation*) dan konsep dari Karl Marx tentang akumulasi primitif (*primitive accumulation*). Menggunakan konsep yang pertama, ia berpendapat bahwa proses ekonomi diwarnai dengan kekerasan politik dan kontestasi kekuasaan. Sementara itu, berlandaskan konsep akumulasi primitif ia merumuskan *Accummulation by Dispossession* (ABD) sebagai sebuah teori baru untuk memahami kapitalisme yang terjadi saat ini. Argumentasi utamanya bahwa ABD merupakan pusat kapitalisme kontemporer. Kapitalisme melahirkan disposisi ganda pada konsep akumulasi kapital. Pada satu sisi, akumulasi kapital adalah sebuah prosedur ekonomi yang memiliki tiga aspek. Pertama, fase terpenting dalam akumulasi adalah proses bisnis antara pelaku industri dan pekerja. Kedua, komoditas pasar mampu menghasilkan nilai surplus. Ketiga, akumulasi bertransformasi menjadi perampasan milik orang lain ketika suatu komoditas di eksploitasi dan peran kelas menggeser kesetaraan. Di sisi lain, akumulasi kapital menunjukkan keterkaitan antara model produksi kapitalis dan non-kapitalis yang muncul di konteks internasional. Pada arena ini, akumulasi kapital menggunakan kebijakan kolonial, sistem kredit global, dan perang sebagai sarana-sarana utama. Dalam proses tersebut, kekuatan, penipuan, dominasi, dan penjarahan dilakukan secara terbuka.

ABD menawarkan lima premis. Pertama, ABD mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan akumulasi berlebihan. Akumulasi berlebihan (*overaccumulation*) adalah situasi dimana kapital yang sangat besar tidak dapat menghasilkan keuntungan. Terkadang kondisi tersebut disertai dengan kelebihan tenaga kerja. Oleh sebab itu, ABD melepaskan aset dengan harga rendah yang kemudian dibeli oleh akumulasi kapital yang berlebih dan mengubahnya menjadi barang yang berharga. Sebagai contoh, di dalam konteks akumulasi primitif aktor melakukan perampasan tanah dan mengusir penduduknya sehingga menjadi tidak memiliki tanah. Tanah tersebut kemudian diprivatisasi sebagai bagian dari proses akumulasi kapital. Harvey menyoroti permodalan dan institusi pemberi kredit yang didukung oleh kekuatan negara, melibatkan ABD dalam proses ini.

Premis kedua menyatakan bahwa ABD adalah sebuah kontingensi. Sebab, ABD kemungkinan dimanifestasikan dalam aksi-aksi tidak terlihat, baik sah maupun melanggar hukum, yang mana memungkinkan kelas tertentu untuk menguasai kapital. ABD muncul dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah waktu dan cara krisis diciptakan oleh produksi yang diperluas. Kondisi kedua menyatakan bahwa ABD terjadi ketika pengusaha dan pemerintah bersama-sama mendirikan sebuah sistem dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan darinya. Dengan kata lain, ABD dapat dilihat sebagai biaya yang sangat diperlukan untuk mengembangkan lompatan kuantum menuju perkembangan kapitalis, yang sepenuhnya didukung oleh negara. Perubahan tersebut dikendalikan oleh alasan internal dan tekanan eksternal. Sebagai contoh, krisis ekonomi terjadi ketika sistem kredit ditekan, likuiditas terkuras habis, dan perusahaan bankrut. Pada umumnya, kondisi tersebut menyebabkan devaluasi dan merusak kesejahteraan sosial dan institusi sosial. Proses tersebut diciptakan oleh kapitalisme global.

Premis ketiga menyatakan bahwa privatisasi adalah ujung tombak dari ABD. Teori neoliberal dan privatisasi politik mengindikasikan bahwa kekuasaan negara adalah aktor utama ABD. Proses tersebut dibiayai oleh finansialisasi, liberalisasi perdagangan, dan penyesuaian sistem pembiayaan global. Proses tersebut akan memicu devaluasi dan akumulasi dengan perampasan di area-area tertentu. Neoliberalisme menggunakan privatisasi dan liberalisasi untuk mengubah fase baru '*enclosure of the commons*' menjadi tujuan kebijakan negara. Pemerintah menjual kekayaannya kepada pasar yang dikelola oleh over akumulasi kekayaan. Neoliberalisme merupakan transformasi radikal, mengubah relasi sosial dan redistribusi kapital yang mana menguntungkan orang-orang kaya dan memiskinkan orang yang kekurangan. Melalui privatisasi negara mengalihkan aset produktif publik, seperti sumber daya alam, ke sektor privat. Hendaknya aset produktif publik tersebut dimiliki oleh rakyat, negara bertanggung jawab mengelolanya. Maka dari itu, para ahli memandang proses ini sebagai perampasan yang bar-bar. Di banyak negara, neoliberalisme merampas kekayaan masyarakat adat sehingga mendorong perlawanan.

Pada premis keempat Harvey memiliki keyakinan bahwa kapitalisme membutuhkan fase penghancuran kreatif yang disertai dengan kekejaman. Atas alasan ini, akumulasi primitif diwarnai dengan serangkaian serangan brutal dan perlawanan. Fenomena tersebut juga terjadi di ABD, memicu perjuangan sosial dan politik serta perlawanan. Gerakan perlawanan ini melanjutkan pertempuran sebelumnya untuk merebut kembali hak. Di sisi lain, perlawanan mampu membangun kekuasaan kelas yang kuat untuk menghasilkan keuntungan material dan mengembangkan standar hidup yang tinggi. Intinya, akumulasi primitif membangun jalan untuk memperluas reproduksi. Sementara itu, ABD mengganggu dan bahkan merusaknya. Tidak diragukan, perlawanan terhadap akumulasi primitif mendorong ketidakpuasan yang berkembang menjadi gerakan pemberontakan, terutama di dalam komunitas masyarakat miskin. Sangat jelas bahwa tujuan politik sosialis adalah untuk menyerang relasi kelas dan model kekuasaan negara yang ingin merubahnya. Maka dari itu, ini bukan untuk melindungi penguasa sebelumnya. Sayangnya pada banyak kasus, developmentalisme sosialis tidak menghargai gerakan pemberontak yang menentang akumulasi dengan perampasan.

Premis kelima menyatakan bahwa perjuangan anti kapitalist dan anti imperialis memiliki domain ganda. Kubu Marxis (sosialis kiri) berpendapat bahwa aktor utama yang mengubah sejarah adalah kaum proletar. Mereka mendeskripsikan kaum proletar sebagai pekerja upahan (buruh) yang tidak memiliki alat produksi. Kontradiksi secara langsung terletak antara kapital dan buruh di dalam ruang produksi. Sementara itu, institusi kelas pekerja menggunakan serikat pekerja dan partai politik. Kedua institusi tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan negara

untuk mengontrol atau menggantikan dominasi kelas kapitalis. Akumulasi kapital menganggap bahwa relasi kelas dan perjuangan kelas serupa dengan reproduksi yang diperluas. Sebagian besar perjuangan melawan kapitalisme tidak memiliki kekuatan yang cukup sehingga gerakan yang dilakukan dapat diberantas dengan mudah oleh perkembangan kapitalisme global.

Perlawanan terhadap perampasan tumbuh di dalam kadar yang berbeda-beda, di level lokal, regional, dan global. Pada kondisi ini, peran negara terlihat tidak relevan. Selain itu, target dan sasaran gerakan ini menyebar, terfragmentasi, dan kontingen. Sebagai contoh, kerusakan lingkungan, privatisasi layanan, perampasan tanah, dan *biopiracy* memiliki pola proses yang berbeda. Di sisi lain, masyarakat dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara membentuk institusi perlawanan yang cair. Para ahli mengkategorisasikan perlawanan tersebut sebagai gerakan pos modern. Harvey juga mengemukakan pendapat jika akumulasi kapital memiliki dua karakteristik, yakni reproduksi yang diperluas dan akumulasi dengan perampasan. Kedua karakteristik tersebut saling terkait satu sama lain. Maka dari itu, baik perjuangan melawan reproduksi yang diperluas dan akumulasi dengan perampasan (ABD) memiliki hubungan dialektikal dimana gerakan sosial berkonsolidasi dengan gerakan anti globalisasi dan bentuk-bentuk alternatifnya. Secara singkat, ABD adalah tantangan terkini bagi gerakan anti globalisasi. Meskipun demikian, relasi dialektikal melawan reproduksi yang diperluas membutuhkan kesadaran. Persoalannya terletak pada tidak setiap gerakan melawan ABD bersifat progresif. Meskipun demikian, perlawanan tersebut penting untuk dipertahankan.

Penelitian ini menggunakan konsep ABD untuk menjelaskan ekonomi politik Indonesia. Terutama di rezim ekstraktif dan bagaimana keterkaitannya dengan perlawanan petani. Premis pertama ABD digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana pemerintah Indonesia bersepakat dengan over akumulasi pada rezim ekstraktif melalui ekonomi politik. Premis kedua digunakan untuk membantu menjelaskan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan sektor publik untuk membangun pertambangan dan industri ekstraktif untuk menghasilkan keuntungan. Premis ketiga digunakan untuk mengkerangka privatisasi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan premis keempat dan kelima digunakan untuk mengkaitkan narasi ekonomi politik Indonesia yang kemudian mendorong perlawanan, dilihat dari konsep-konsep perlawanan.

Konsep Perlawanan

Pada awalnya, studi perlawanan (*resistance study*) berpusat pada revolusi dan gerakan kolektif besar-besaran untuk menentang kebijakan negara secara terang-terangan. Fletcher (2001) menjelaskan bahwa hampir pada saat yang sama, tiga perspektif baru tentang perlawanan muncul pada 1970-an dan 1980-an. *Pertama*, Foucault dan Certeau bekerja dalam filsafat sosial Prancis untuk mengembangkan bentuk kehidupan sehari-hari dan subjektivitas marjinal yang lebih eksplisit. *Kedua*, dalam studi agraria, Scott mempromosikan bentuk sehari-hari (*everyday resistance*) perlawanan petani. *Ketiga*, Guha, dalam historiografi Marxis, mendorong komunitas kolonial di Asia Selatan untuk secara cerdas membantah dominasi kolonialis Eropa. Bentuk perlawanan sehari-hari menjadi perspektif utama dalam studi resistensi.

Pada dasarnya, studi tentang perlawanan berasal dari agenda politik kiri atas keyakinan bahwa masyarakat harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan oleh pelanggaran prinsip-prinsip ini (Fletcher, 2001). Fletcher menegaskan bahwa perlawanan sangat terkait dengan kekuasaan. Dia menyarankan beberapa ide. *Pertama*, dikotomi antara kekuasaan dan perlawanan harus diberantas. Perlawanan harus dipahami sebagai produk kekuasaan karena ia menjalankan kekuasaan. Perlawanan bisa

menjadi perebutan kekuasaan antara yang kuat dan yang tidak berdaya. Dengan kata lain, perlawanan adalah fungsi kekuasaan sebagai upaya untuk membangun arena kekuasaan di mana bawahan diizinkan untuk mewujudkan dominasi yang perlu dilawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tempat seperti itu didirikan dan bagaimana subaltern dapat diberdayakan sehingga mereka dapat melawan. *Kedua*, identifikasi bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari dapat dihapus karena perlawanan terhadap kekuasaan, seperti ketidakpuasan dan pemberontakan kecil, selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan selalu hadir dalam hubungan sosial, sehingga selalu ada perlawanan terhadap kekuasaan itu. *Ketiga*, perlawanan dan oposisi perlu dipisahkan. Perlawanan muncul ketika subjek kekuasaan mengakui dan mempertahankan legitimasinya. Perlawanan berubah menjadi oposisi ketika bawahan tidak lagi tunduk pada kekuasaan. Membedakan perlawanan dan oposisi dapat mempertajam eksplorasi asal-usul perjuangan bawahan, di mana hegemoni elit ditantang dan diatasi. Upaya untuk memperjuangkan pengaruh luar yang tidak pernah dianggap sah juga dapat disebut sebagai oposisi.

Studi resistensi pesat berkembang. Sebagian besar perlawanan lebih terkait dengan sikap antisosial, destruktif, ideologi revolusioner reaksioner, ledakan kekerasan yang tak terduga, dan wabah emosional. Perlawanan berpotensi produktif, jamak, cair, dan terintegrasi ke dalam kehidupan sosial sehari-hari sehingga dapat secara menguntungkan membentuk kembali masyarakat dan mengubah sejarah. Baaz dkk. (2016) mengkategorikan wacana resistensi menjadi tiga kelompok studi (Baaz dkk., 2016). *Pertama*, tantangan konfrontatif dan publik dari kontra-kekuasaan, seperti revolusi, demonstrasi, pemogokan serikat pekerja, dan boikot. *Kedua*, perlawanan sehari-hari oleh Scott, yang mengembangkan jenis perlawanan, seperti bentuk perlawanan terselubung yang tersembunyi. *Ketiga*, adalah komponen campuran dari bentuk terselubung dan publik. Berdasarkan kuantitas dan manajemen, para pakar perlawanan mengkategorikan perlawanan sebagai perlawanan kolektif/terorganisir dan perlawanan individu/tidak terorganisir atau skala kecil. Perlawanan skala kecil dapat diajukan di antara tindakan individu dan kolektif. Baaz et al. (2016) menyarankan tujuh aspek analisis (dimensi) untuk mengeksplorasi resistensi secara komprehensif. Aspek-aspeknya adalah (1) repertoar resistensi mengenai konfigurasi kekuasaan tertentu, (2) spektrum antara resistensi terorganisir dan individu, (3) aspek temporal resistensi, (4) dimensi spasial resistensi, (5) hubungan antara tubuh dan representasi, (6) resistensi memperkuat dan / atau menciptakan kinerja resistensi baru, dan (7) proses refleksi diri dan mempengaruhi (Baaz et al. 2016, hlm.45-48).

Menurut Hollander dan Einwohner (2004), perlawanan adalah pencegahan oleh aktor, target, dan pengamat lainnya. Oleh karena itu, memahami interaksi aktor (penentang), target, dan pengamat lainnya adalah cara untuk memahami sifat perlawanan. Mempertimbangkan interaksi ini menekankan peran kekuasaan yang bermanifestasi dalam hubungan interaksional. Young (2015) berargumen bahwa perlawanan dibentuk oleh lima masalah mendasar yaitu interaksi struktur dan agensi, peran yang dimainkan niat dalam perlawanan, sifat kekuasaan, pemahaman pasar, dan kemungkinan emansipasi. Sementara itu, Johansson dan Vinthagen (2016) membangun kerangka kerja yang terdiri dari empat dimensi perlawanan sehari-hari, yaitu repertoar, hubungan agen, spesialisasi, dan temporalisasi. Penelitian dalam perlawanan sehari-hari harus mempertimbangkan empat dimensi sosiologis mendasar repertoar, waktu, ruang, dan hubungan) bersama dengan empat persimpangan mendasar dari hubungan kekuasaan (gender, seksualitas, kelas dan ras/etnis).

Di sisi lain, Chin dan Mittelman (1997) meneliti perlawanan terhadap globalisasi menggunakan teori resistensi trialektik oleh Gramsci, Polanyi, dan Scott. Dengan membandingkan tiga teori perlawanan utama, mereka mengidentifikasi dan menentang bentuk-bentuk dominasi, memperluas wilayah politik dan memulai aksi baru. Mereka mengembangkan konseptualisasi perlawanan kontemporer terhadap globalisasi yang terdiri dari empat dimensi, yaitu bentuk perlawanan, agen perlawanan, tempat perlawanan, dan strategi perlawanan. Menurut Lilja, Baaz, dan Vinthagen (2013), perlawanan adalah respons terhadap kekuasaan dari 'bawah', praktik subaltern yang dapat menantang, menegosiasikan, dan melemahkan kekuasaan. Namun, resistensi mungkin dapat menjadi parasit untuk kekuasaan dan/atau merusak kekuasaan.

Dari berbagai definisi dan dimensi perlawanan tersebut, dirumuskan beberapa aspek penting perlawanan sebagai berikut:

1. Sasaran dan tujuan perlawanan
2. Pendorong perlawanan
3. Konfigurasi kekuasaan di dalam perlawanan
4. Karakter perlawanan terorganisir atau individual
5. Dimensi spasial perlawanan
6. Representasi di dalam perlawanan
7. Refleksi atau dampak perlawanan
8. Inspirasi perlawanan
9. Basis perlawanan
10. Gaya perlawanan
11. Skala perlawanan
12. Tingkat koordinasi di dalam perlawanan
13. Nilai hidup dan budaya
14. Perbedaan perspektif di dalam perlawanan

Aspek-aspek di dalam perlawanan tersebut digunakan untuk menginterpretasikan data temuan lapangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan Wilayah Kontrak Karya (konsesi) rencana penambangan besi pasir. Lokasi penelitian meliputi Trisik di Desa Banaran, Gupit dan Siliran di Desa Karangsewu (Kecamatan Galur), Bugel dan Garongan (Kecamatan Panjatan) serta Karangwuni (Kecamatan Wates). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal untuk fokus pada peristiwa kontemporer. Sebuah studi kasus dapat melibatkan orang dengan pengalaman kasus atau untuk memberikan gambaran yang kaya dari suatu peristiwa, proyek, atau program kemudian menafsirkan temuan untuk membangun pemahaman tentang kasus (Leavy, 2014). Studi kasus digunakan untuk menjelaskan resistensi petani dalam konteks rencana pertambangan sebagai fenomena tertentu. Studi kasus mencari faktor-faktor kasual untuk menjelaskan fenomena tertentu. Fokus utama dari studi kasus adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kondisi tertentu muncul, yaitu mengapa urutan peristiwa tertentu terjadi atau tidak terjadi (Yin, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, observasi langsung dan naturalistik serta analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara individual dengan mewawancarai orang per orang (*one on one interview*). Wawancara berlangsung sekitar 1 – 2 jam melalui satu kali kunjungan atau beberapa kali kunjungan.

Observasi akan dilakukan melalui pengamatan langsung dan naturalistik. Pengamatan naturalistik sangat penting dalam lingkungan yang sangat dipolitisasi, seperti dalam masyarakat paska konflik, di mana dalam wawancara informan dapat menyembunyikan "kebenaran". Observasi dilakukan ketika acara peringatan hari ulang tahun PPLP yang mengekspresikan perlawanan mereka. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan pada media yang memberitakan perlawanan PPLP.

Target informan sekitar 15 orang yang ditentukan secara purposif. Informan meliputi pengurus dan anggota PPLP yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu anggota PPLP, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan berusia di atas 40 tahun yang terlibat konflik rencana penambangan pasir besi sejak awal (tahun 2006 atau sebelumnya). Setiap selesai melakukan wawancara, dibuat catatan lapangan untuk merekam data. Data tersebut akan ditafsirkan menggunakan fenomenologi hermeneutik, memberikan kesempatan terbaik untuk 'menyuarakan' pengalaman dalam konteks konflik rencana penambangan pasir besi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dilihat menggunakan sudut pandang perlawanan terhadap neoliberalisme. Oleh sebab itu, sebelum membahas tentang perlawanan di akar rumput tersebut, dibahas tentang bagaimana neoliberalisme berkembang dalam proses ekonomi politik Indonesia yang kemudian menghasilkan rezim ekstraktif. Rezim ekstraktif inilah yang kemudian melakukan eksploitasi SDA dan mendorong lahirnya gerakan masyarakat akar rumput untuk melawan perampasan tanah, perampasan ruang hidup, dan mencegah kerusakan lingkungan.

a. Neoliberalisme Mendorong Berkembangnya Rezim Ekstraktif di Indonesia

Globalisasi dan neoliberalisme secara signifikan mempengaruhi perkembangan ekonomi politik Indonesia yang menerapkan ide-ide neoliberalisme. Aktor global seperti negara, lembaga keuangan internasional, LSM, dan sektor swasta mengendalikan ekonomi politik Indonesia. Pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi nasional di tengah ekonomi pasar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan dan memprioritaskan kekayaan pribadi pihak-pihak tertentu. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menganut ekstraktivisme dan mengembangkan rezim ekstraktif yang mengandalkan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka pintu paling ekspansif bagi investasi asing. Setelah era kolonial, kebijakan neoliberal diterapkan oleh setiap rezim penguasa yang mendukung investasi asing, utang luar negeri, dan akumulasi kepemilikan pribadi.

Boediono (2016) menekankan bahwa situasi ekonomi yang dialami oleh periode tertentu dihasilkan dari interaksi tiga aspek. *Pertama*, kebijakan moneter, yang pada umumnya merupakan hasil dari pandangan politik. *Kedua*, situasi politik yang menginspirasi dan mengakomodasi kebijakan. *Ketiga*, fenomena dunia yang mempengaruhi urusan dalam negeri. Tidak diragukan lagi, situasi kebijakan, politik, dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh politik global dan fenomena ekonomi. Misalnya, depresi ekonomi dunia adalah fenomena ekonomi global, dan perang dunia adalah fenomena politik internasional.

Selanjutnya, politik dan ekonomi saling terkait dalam kehidupan bernegara dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kasus Indonesia, politik menentukan ekonomi. Pasalnya, pandangan dan tujuan politik menentukan pola kebijakan ekonomi untuk mewujudkan tujuan politik tersebut. Booth (2016) mengkategorikan perubahan politik Indonesia pasca kemerdekaan menggunakan

tiga periode. Periode pertama adalah pada tanggal 27 Desember 1949, ketika pemerintah Hindia Belanda mengalihkan kekuasaan terakhir kepada pemerintah Indonesia yang baru. Periode kedua terjadi pada 11 Maret 1966, ketika pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Periode ketiga pada 21 Mei 1998, ketika era demokratisasi dimulai.

Penelitian ini mengkategorisasikan tahapan ekonomi politik Indonesia menjadi tiga periode. Periode pertama adalah era milik negara (*state owned*), kedua adalah era marketisasi, dan yang ketiga adalah era demokratisasi. Eksplorasi bagaimana setiap era membentuk ekonomi politik Indonesia sangat penting karena memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda dalam mengembangkan kapitalisasi. Setiap era memiliki strategi untuk menerapkan ide-ide kapitalisme dan neoliberalisme untuk mendukung kebijakan pembangunan pro-pasar. Keberadaan utang luar negeri yang meningkat menjadi pertanyaan besar. Mengapa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak mampu menciptakan kedaulatan ekonomi? Pinjaman luar negeri, investasi asing, dan pengerukan sumber daya alam juga meningkat. Singkatnya, era marketisasi mengembangkan tonggak ekonomi politik Indonesia, menerapkan ide-ide neoliberalisme yang mempengaruhi perkembangannya saat ini.

Indonesia mengalami berbagai strategi ekonomi politik, antara lain merkantilisme di era kolonial awal, ekonomi terpimpin di era *state owned*, liberalisme di era marketisasi, dan neoliberalisme di era demokratisasi. Rezim ekstraktif Indonesia dimulai pada masa kolonial, ditandai dengan perubahan komoditas ekspor. Misalnya, pada abad kesembilan belas, terjadi perubahan komoditas ekspor dari kopi menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi minyak bumi pada akhir abad kedua puluh. Selanjutnya, rezim berkembang selama proyek pembangunan pasca-Perang Dunia II. Menurut Gellert (2019), rezim ekstraktif Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua periode yang berbeda, yaitu siklus nasionalisme sumberdaya pertama pada 1950an sampai 1970an dan siklus nasionalisme sumberdaya kedua pada tahun 1980an sampai 1990an.

Di era pasca-kolonial, rezim ekstraktif Indonesia muncul karena interaksi antara ideologi sosialis dan nasionalis Sukarno dan kapitalisme Orde Baru Suharto yang otoriter, ditandai dengan ekonomi non-liberal. Gellert (2010) berpendapat bahwa keterkaitan faktor lokal dan global, membentuk kemunculan dan perkembangan rezim ekstraktif di Indonesia. Realitas historis adalah bahwa presiden perdana Indonesia, Sukarno, mengadopsi sikap non-blok selama Perang Dingin, yang merupakan faktor internasional. Selanjutnya, pada tahun 1965, kudeta dan genosida yang didukung Amerika Serikat yang diatur oleh partai komunis Indonesia terjadi. Presiden berikutnya, Suharto, mengadopsi posisi yang menentang komunisme dan mendukung Amerika Serikat di berbagai domain, termasuk ekonomi, politik, dan militer.

Rezim ekstraktif didirikan berdasarkan developmentalisme selama fase awal siklus nasionalisme sumberdaya. Tujuannya adalah untuk menasionalisasi kepemilikan sumber daya untuk memfasilitasi redistribusi progresif, transformasi industri, dan tindakan kolektif untuk memperbaiki harga pasar. Dalam siklus nasionalisme sumberdaya saat ini, ideologi neoliberalisme telah mempengaruhi prinsip-prinsip developmentalisme dan menghasilkan pendekatan yang lebih berorientasi pasar. Untuk memperoleh izin penggunaan lahan, pemerintahan Indonesia berupaya melembagakan modalitas kepemilikan bersama atas tambang dan perkebunan melalui hegemoni politik lokal dan regional. Paradigma pembangunan yang berkembang menggabungkan tuntutan khusus untuk mengakui hak atas tanah dari masyarakat regional dan penduduk asli. Tujuan utamanya adalah membangun dan meningkatkan jaminan hukum untuk komersialisasi ekstensif tanah dan sumber daya Indonesia, yang biasa disebut 'pasar dalam', menggunakan komodifikasi yang meningkat dan berkelanjutan (Gellert 2019). Negara

semi-periferal, diklasifikasikan sebagai sub-imperialis karena praktik ekspansi teritorial mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Kecenderungan ideologis mereka adalah terhadap neoliberalisme yang kemudian berkembang menjadi predatoris.

Rezim kontemporer di Indonesia dibentuk oleh rezim yang mengekstraksi sumber daya, dengan pergeseran jenis sumber daya yang diekstraksi. Periode neoliberalisme awal di Indonesia menyaksikan rezim ekstraktif yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno (Pemerintah Orde Lama) dan Presiden Suharto (Pemerintah Orde Baru). Siklus pertama nasionalisme sumberdaya dimulai pada pemerintahan rezim Orde Lama. Perang Dingin di Asia memperkuat keadaan ini melalui pengesahan strategi nasional dan fasilitasi agregasi sumber daya. Fenomena nasionalisme sumber daya muncul dalam konteks gerakan anti-kolonial. Paska kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950an terjadi proses nasionalisasi ladang minyak dan perkebunan milik Belanda. Dampaknya adalah adanya kepentingan kapitalis Amerika Serikat yang diduga memberikan dukungan untuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap kepemimpinan Sukarno, serta genosida berikutnya yang terjadi selama tahun 1965-1966.

Di era Perang Dingin, kepentingan geopolitik dan ideologis Indonesia bagi Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, cenderung rendah. Presiden Sukarno mengarahkan negara Indonesia untuk non-blok dan tidak berpihak pada Blok Barat atau Blok Timur. Pada akhir 1950an dan awal 1960an, Pemerintah Orde Lama berusaha untuk membangun ekonomi nasional dengan menasionalisasi industri perkebunan, minyak, dan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda dan perusahaan-perusahaan Barat lainnya. Selain itu, Sukarno mengabaikan bantuan internasional. Pada tahun 1964, ia membuat keputusan penting bahwa Indonesia keluar dari PBB. Tindakan-tindakan ini menunjukkan sikap anti-Barat Sukarno. Sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kesulitan ekonomi yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi, dan kemunduran dari pasar internasional selama puncak masa jabatan Sukarno. Pada tahun 1965, Pemerintahan Sukarno digulingkan oleh kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI diikuti dengan kekerasan politik, dimana terjadi pembantaian jutaan anggota PKI oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintahan selanjutnya adalah Orde Baru. Di Era Orde Baru, rezim ekstraktif mengalami pertumbuhan signifikan dengan mengeksploitasi berbagai industri seperti minyak, kayu, mineral, dan komoditas lainnya. Periode ini juga sejalan dengan fase neoliberalisme. Dimulainya neoliberalisme dapat ditelusuri kembali ke tahun 1968, ketika Suharto memprakarsai liberalisasi kebijakan investasi asing, yang mengakibatkan stabilisasi inflasi dan pemulihan ekonomi. Daya tahan sistem politik ini dikaitkan dengan ketergantungannya pada bantuan keuangan eksternal, investasi, dan partisipasi aktifnya di pasar mata uang internasional. Rezim liberal dimulai pada tahun 1967 melalui undang-undang investasi asing dan tur internasional untuk mempromosikan lingkungan politik baru yang ramah bagi bisnis dan investor asing. Pada saat yang sama, bantuan asing menyerbu Indonesia, salah satunya adalah Bank Dunia. Pada saat itu, rezim ekstraktif didirikan untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, deposit mineral, kayu, dan sektor kelautan. Orde Baru menambah skala ekspor dan mengejar industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk membangun legitimasi rezim ekstraktif. Selain itu, rezim ekstraktif mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk lokal dan memunculkan perselisihan dengan anggota masyarakat. Untuk melawan protes di berbagai daerah, Suharto memanfaatkan kekuatan militer.

Selanjutnya, Pemerintahan Suharto terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam dan memanfaatkan ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah

Orde Baru menerapkan undang-undang sumber daya sektoral yang melampaui kewenangan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada saat yang sama, lembaga administrasi menciptakan mekanisme hukum yang memberikan kekuatan besar kepada pemerintah pusat untuk mengelola SDA. Monopoli pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat telah menyebabkan berbagai konflik. Selama periode itu, rezim ekstraktif didirikan dengan memanfaatkan beragam SDA, tetapi tidak terbatas pada minyak, gas, pertambangan, kayu, dan perikanan. Negara memberikan wewenang atas sumber daya hutan untuk mengakumulasi modal dan menetapkan kontrol eksklusif atas rute perdagangan. Rezim ekstraktif sangat bergantung pada ekspor komoditas hutan, termasuk kayu lapis dan kayu gelondongan. Pada 1980an, Indonesia menerapkan langkah-langkah untuk beradaptasi dengan kebijakan ekonomi neoliberalisme, yang mencakup liberalisasi nilai tukar dan perbankan. Gelar negara berkembang disematkan pada Indonesia pada akhir masa Orde Baru pada tahun 1980an hingga 1990an.

Industri pertambangan menjadi target pertama penerapan gagasan neoliberalisme di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah membuka penanaman modal asing dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa investasi asing di bidang pertambangan didasarkan pada kerja sama dengan pemerintah berdasarkan kontrak karya atau bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan penanaman modal di bidang pertambangan dirinci dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini melegalkan Kontrak Karya, model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal di industri pertambangan.

Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat adalah perusahaan asing pertama yang menerima Kontrak Karya dari pemerintah Indonesia pada bulan April 1967. Perusahaan tersebut menerima berbagai hak istimewa dari pemerintah. Salah satunya adalah menyiapkan rancangan kontrak kerja, yang disetujui pemerintah. Pemerintah mengambil langkah ini untuk menarik investasi asing. Upaya pemerintah untuk mengundang investasi asing berhasil. Pada tahun 1970, sembilan perusahaan asing memperoleh kontrak kerja. Era pemerintahan Orde Baru membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing. Bahkan mendapat predikat negara paling menarik pada bidang investasi pertambangan di Asia. Perusahaan industri pertambangan internasional seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc., dan Inco Ltd. berinvestasi di Indonesia. Mereka mendapatkan keuntungan besar dan dilindungi oleh jaminan politik yang solid. Namun, pemerintah harus membayar harga yang mahal untuk keberhasilan ini. Karena fungsi negara neoliberal pusat dalam memastikan pengerukan mineral, telah terjadi konflik dan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai sengketa terjadi di industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pasalnya, negara perlu melindungi kepemilikan barang milik pribadi dengan memberikan jaminan kepada korporasi swasta dan tidak mengakui berbagai model kepemilikan petani atas tanah (Pratiwi, 2021).

Di Indonesia, krisis keuangan Asia pada tahun 1998 berdampak demonstrasi besar-besaran yang bertujuan menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada Mei 1998. Sayangnya, reformasi politik tidak secara mendasar mengubah struktur negara atau komposisi kelas masyarakat. Titik ini menandai dimulainya fase reformasi demokratis pasca-Suharto, di mana peluang yang lebih signifikan tersedia untuk ekstraksi sumber daya. Rezim ekstraktif memasuki fase baru yang berpusat pada ekstraksi berbagai komoditas. Pengaruh liberalisme kapitalis telah menambah dan memperluas lingkup komodifikasi.

Rezim ekstraktif di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa hingga saat ini. Meskipun menghadapi perlawanan di berbagai wilayah di Indonesia, rezim ini mempertahankan posisi yang mengakar kuat. Dapat disimpulkan bahwa lintasan perkembangan rezim ekstraktif menunjukkan dikotomi antara dua aspek antitesis. Menurut pemerintah dan elit global pendukungnya, rezim ini dianggap benar dan sah. Sebaliknya, bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh industri ekstraktif, sistem pemerintahan dianggap tidak sah dan ditandai dengan tindakan kekerasan.

Sejarah ekonomi Indonesia dalam dua abad terakhir menunjukkan pemisahan antara negara predator dan negara maju. Negara pembangunan saat ini adalah tujuan utama, tetapi itu tidak berarti rezim ekstraktif berakhir. Gellert (2010) percaya bahwa ekstraksi sumber daya yang digerakkan oleh kapitalis ke inti sistem dunia mengakomodasi akumulasi perifer dan memperkuat para pemimpin politik. Dari tahun 1950an hingga awal 1970an, nasionalisme sumber daya menekankan gagasan kepemilikan ekstraksi dan pemrosesan sumber daya. Dari tahun 1980an hingga awal 1990an, kebijakan statisme diterapkan, menghasilkan transformasi industri yang lebih luas. Marketisasi semakin tergantung pada konsep keunggulan komparatif dan perluasan ekstraktivisme. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai 'developmentalisme baru', ditandai dengan peran negara yang diperluas dengan tetap menerima modal swasta.

Pada tahun 2000an, Indonesia mengubah struktur ekonominya, beralih dari ketergantungan sumber daya alam. Ekonomi mengalami proses re-periferalisasi, di mana penggantian ekspor sumber daya dengan yang baru terjadi karena kegagalan industri manufaktur. Indonesia telah bertransisi menuju negara berproduksi menengah yang didorong oleh konsumerisme, namun ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam. Meskipun banyak investor asing membutuhkan sumber daya alam mereka, Indonesia mengalami kematian pembangunan seperti proyek nasional lainnya. Gelombang nasionalisme sumber daya kontemporer membatasi peran marketisasi. Selain itu, dapat diamati bahwa negara dan modalnya telah memainkan peran penting dalam proses akuisisi lahan untuk budidaya kelapa sawit melalui pengambilalihan (akumulasi dengan perampasan), serta ekspansi kegiatan penambangan batubara, yang telah disertai dengan langkah-langkah pemaksaan kepada pemilik tanah untuk melepaskan hak kepemilikan mereka.

Proses ekonomi politik tersebut menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya akumulasi dengan perampasan dan mendorong lahirnya berbagai perlawanan masyarakat akar rumput yang dirugikan. Perlawanan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, merupakan bagian dari upaya melawan hegemoni neoliberalisme yang digencarkan sektor bisnis dan didukung oleh negara. Oleh sebab itu, untuk memahai perlawanan petani di akar rumput, perlu memahami terlebih dahulu kondisi ekonomi politik di level nasional dan global supaya mendapatkan potret bagaimana neoliberalisme bekerja, khususnya di dalam rezim ekstraktif.

b. Keberlanjutan Perlawanan PPLP terhadap Kebijakan Neoliberalisme

Perlawanan petani lahan pantai, dimulai pada tahun 2006, ketika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Bersama dengan PT Jogja Magasa Mining, Ltd (PT JMI) mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi di desa-desa pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo. Pada saat itu, perlawanan masih bersifat sporadis berupa penolakan untuk menghadiri acara sosialisasi dan pemboikotan acara sosialisasi. Untuk memperkuat perlawanan, petani lahan pantai membentuk Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) pada 1 April 2006. Sejak saat itu berbagai aksi penolakan rencana penambangan pasir besi dilakukan, seperti demonstrasi, publik hearing dan mujahadah atau doa bersama. Berikut kronik perjuangan PPLP tersebut.

Tabel 1. Kronik Perjuangan PPLP

Tanggal	Aksi
1 April 2006	Masyarakat pesisir dari 10 desa di 4 kecamatan membentuk PPLP
27 Agustus 2007	PPLP berdemonstrasi di Kantor DPRD Kulon Progo menuntut pembatalan proyek pasir besi
4 Februari 2008	Warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan Kedubes Australia meminta kejelasan identitas PT Indo Mines, Ltd. (PT JMI).
1 Maret 2008	Warga Bugel melakukan aksi blokir jalan menuju kawasan pantai untuk menghadang pengangkutan material ke Pilot Proyek PT. JMI.
20 Oktober 2009	Konsultasi publik KA ANDAL oleh PT JMI yang tidak menampung aspirasi masyarakat terdampak sehingga diwarnai kericuhan.
April 2010	Masyarakat pesisir mengirimkan surat pernyataan sikap penolakan rencana penambangan pasir besi kepada Presiden RI.
Mei 2010	Masyarakat pesisir mengirim surat kepada DPRD DIY menuntut DPRD DIY mengusut dugaan skandal perundang-undangan dalam proses penyusunan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2019 oleh Gubernur Propinsi DIY.
Juni 2010	Masyarakat pesisir berkirim surat kepada DPRD untuk mengajukan pembatalan Perda No. 2 Tahun 2010 yang melanggar UU No. 10 Tahun 2004 dan Permendagri No. 28 Tahun 2008.
15 Desember 2010	Aksi rapat akbar menolak rencana penambangan pasir besi bertepatan dengan penilaian dokumen KA ANDAL di Desa Bugel.
16 Desember 2010	Aksi warga menghentikan tindakan yang meresahkan yang dilakukan oleh oknum Pakualam di Bugel.
3 – 6 Juni 2008	KOMNAS HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap rencana penambangan pasir besi dan merekomendasikan bahwa rencana penambangan tersebut dapat memicu pelanggaran HAM, yakni hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, dan hak petani.
21 Juli 2008	3000 massa PPLP berdemonstrasi di UGM menuntut penghentian kerja sama reklamasi lahan paska penambangan oleh Fakultas Kehutanan UGM dengan PT JMI. Tuntutan ini disetujui.
27 Oktober 2008	Sekumpulan massa dari luar Kawasan konflik melakukan persakan dan pembakaran 7 posko PPLP dan 1 rumah milik warga pesisir.

Tanggal	Aksi
23 – 25 Oktober 2008	Masyarakat pesisir berdemonstrasi di Kantor DPRD Kulon Progo untuk menuntut pembatalan rencana penambangan pasir besi karena berpotensi melanggar HAM.
19 Juli 2009	PPLP mengadakan pertemuan di LBH membahas kasus kriminalisasi terhadap salah satu warga pesisir.
17 Desember 2010	PPLP melakukan penutupan Pilot Proyek PT JMI di Pantai Trisik setelah 3 tahun beroperasi.
9 Februari 2011	Mediasi oleh KOMNAS HAM di Bugel, menghasilkan rekomendasi <i>deadlock</i> untuk mediasi para pihak terkait.

Sumber: Asmara Artzine, 2024.

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DIY menunda rencana penambangan pasir besi sampai saat ini tanpa kejelasan. Namun demikian, PPLP tetap menunjukkan eksistensinya menolak rencana penambangan pasir besi. Perlawanan ditunjukkan dengan menyelenggarakan ulang tahun peringatan hari lahir PPLP, doa bersama (mujahadah), dan syawalan masyarakat pesisir untuk memper erat silaturahmi dan merawat solidaritas perlawanan. Selain itu, perlawanan ditunjukkan melalui upaya terus bercocok tanam di wilayah pesisir yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga pesisir.

Pada saat artikel ini ditulis, penelitian lapangan sedang berjalan sehingga data penelitian belum terkumpul secara lengkap. Berikut analisis terhadap temuan lapangan sementara.

Tabel 2. Interpretasi Temuan Lapangan Sementara

Aspek Perlawanan	Temuan
Sasaran dan tujuan perlawanan	Perlawanan PPLP menasar rencana penambangan pasir besi dan semua bentuk kebijakan neoliberalisme yang berpotensi merampas tanah dan ruang hidup mereka di pesisir Kulon Progo
Pendorong perlawanan	Perlawanan didorong untuk mempertahankan lahan pantai sebagai sumber mata pencaharian petani
Konfigurasi kekuasaan di dalam perlawanan	Perlawanan PPLP dilakukan oleh semua petani lahan pantai yang didukung oleh beberapa LSM, akademisi, dan seniman. Konfigurasi kekuasaan cukup beragam dan saling mengisi satu-sama lain
Karakter perlawanan: terorganisir atau individual	Perlawanan PPLP terorganisir. Terdapat koordinator lapangan di level dusun dan desa sehingga koordinasi berjalan cepat dan terstruktur
Dimensi spasial perlawanan	Perlawanan PPLP merupakan gerakan sosial akar rumput di ranah lokal, yakni di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo
Representasi di dalam perlawanan	Setiap dusun dan desa memiliki wakil di dalam kepengurusan PPLP
Refleksi atau dampak perlawanan	Perlawanan memunculkan solidaritas petani pesisir dan perlawanan PPLP menjadi praktik baik serta rujukan

Aspek Perlawanan	Temuan
Inspirasi perlawanan	belajar bagi gerakan akar rumput lainnya Perlawanan terinspirasi oleh penokohan yang kuat di tubuh PPLP
Basis perlawanan	Basis perlawanan PPLP adalah petani lahan pantai
Gaya perlawanan	Perlawanan berupa perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup
Skala perlawanan	Pada umumnya skala perlawanan cukup besar, meliputi hampir semua petani di lahan pantai
Tingkat koordinasi di dalam perlawanan	Koordinasi dilakukan mulai dari tingkat pedukuhan, desa, dan antar-kecamatan
Nilai hidup dan budaya	PPLP yakin bahwa perlawanan mereka berhasil berkat ijin Allah SWT karena mereka mempertahankan hak hidup dan kelestarian lingkungan
Perbedaan perspektif di dalam perlawanan	Setidaknya terdapat dua karakteristik perlawanan di dalam tubuh PPLP, yakni perlawanan secara halus menggunakan strategi dan perlawanan secara frontal

Perlawanan PPLP didukung oleh berbagai kalangan seperti solidaritas seniman Jogja, LBH, dan para aktivis yang membela hak-hak asasi manusia. *Networking* yang memberikan informasi dan meningkatkan keterampilan mengorganisasikan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan perjuangan PPLP menolak rencana penambangan pasir besi. Oleh sebab itu, perjuangan PPLP melawan kebijakan neoliberalisme tetap dipelihara karena sewaktu-waktu perampasan lahan pantai dapat saja terjadi.

KESIMPULAN

Konsistensi dan keberlanjutan perlawanan PPLP ini menunjukkan kekuatan gerakan akar rumput menentang kebijakan yang mengeksploitasi sumber daya alam (ekstraktivisme). Pada kasus ini, akumulasi dengan perampasan dilakukan oleh sektor swasta yang didukung oleh negara dan aristokrat lokal yang mengklaim sebagai pemilik lahan pantai. Rezim ekstraktivis yang diperakan oleh negara melahirkan berbagai macam kebijakan untuk mendukung rencana penambangan pasir besi. Namun, berbagai strategi perampasan ruang hidup tersebut berhasil digagalkan berkat perjuangan PPLP yang menggunakan berbagai bentuk perlawanan baik secara terbuka maupun tertutup dengan mengandalkan jejaring yang dimilikinya. Perlawanan PPLP ini menjadi bukti bahwa masyarakat akar rumput dapat menang melawan upaya negara dan sektor swasta melakukan akumulasi dengan perampasan (ABD) di tengah banyaknya kasus represi terhadap gerakan perlawanan serupa di seluruh penjuru Indonesia. PPLP telah membuktikan perlawanan dari bawah tidaklah mudah, namun bisa dilakukan, dan bisa berhasil jika mampu mengorganisasikan masyarakat dan menggunakan strategi yang tepat.

Penelitian ini masih berjalan, sehingga masih banyak ruang-ruang yang belum dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, secara metodologis, penelitian ini dihadapkan pada kendala sulitnya mengakses informan dan dokumen tertulis. Tidak semua informan potensial mau diwawancarai dan tidak bisa mengakses data-data tertulis. Secara substantif, persoalan status kepemilikan tanah pesisir merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam. Sampai saat ini, terdapat perbedaan pandangan terhadap status kepemilikan lahan pantai, apakah milik Pakuaman (*Pakualam Ground*) atau tanah *wedi kengser* sehingga bebas dikelola dan dimiliki oleh warga pesisir. Selain itu, pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh PPLP juga menarik untuk digali lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi doktoral di University of Limerick, Irlandia.

REFERENSI

- Asmara Artzine. (2024). *Riwayat Pemakan Pasir*. Yogyakarta: Asmara Artzine.
- Baaz, M., Lilja, M., Schulz, M., and Vinthagen, S. (2016). Defining and Analyzing “Resistance”: Possible Entrances to the Study of Subversive Practices, *Alternatives. Global, Local, Political*, 41(3), 137–153, available: <https://doi.org/10.1177/0304375417700170>.
- Baswir, R. (2009) *Bahaya Neoliberalisme (The Dangers of Neoliberalism)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Booth, A. (2016). *Economic Change in Modern Indonesia*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Boediono, (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Indonesia's Economy on a Historical Trajectory)*. Bandung: Mizan.
- Chagnon, C.W., Durante, F., Gills, B.K., Hagolani-Albov, S.E., Hokkanen, S., Kangasluoma, S.M.J., Kontinen, H., Kröger, M., LaFleur, W., Ollinaho, O., and Vuola, M.P.S. (2022). From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept. *The Journal of Peasant Studies*, 49(4), 760–792, available: <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2069015>.
- Chin, C.B.N. and Mittelman, J.H. (1997). Conceptualising Resistance to Globalisation. *New Political Economy*, 2(1), 25–37, available: <https://doi.org/10.1080/13563469708406282>.
- Fletcher, R. (2001). What are we fighting for? Rethinking resistance in a Pewenche community in Chile. *Journal of Peasant Studies*, 28(3), 37–66, available: <https://doi.org/10.1080/03066150108438774>.
- Gellert, P.K. (2010). Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development. *Rural Sociology*, 75(1), 28-57.
- Gellert, P. K. (2019). Neoliberalism and altered state developmentalism in the twenty-first-century extractive regime of Indonesia. *Globalizations*, 16(6), 894-918.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hollander, J.A. and Einwohner, R.L. (2004). Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, 19(4), 533–554.
- Johansson and Vinthagen. (2016). Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework. *Critical Sociology*, 42(3), 417–435, available:

<https://doi.org/10.1177/0896920514524604>.

Leavy, P. (Ed.) (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford library of psychology, Oxford; New York: Oxford University Press.

Lilja, M., Baaz, M. and Vinthagen, S. (2013). Exploring “irrational resistance”. *Journal of Political Power*, 6(2), pp. 201–217. Available at: <https://doi.org/10.1080/2158379X.2013.809212>.

Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik dalam Pembangunan di Indonesia (Economic Policy: Perspectives on Political Economy in Development in Indonesia), *Jurnal Abiwara*, 3(1), 1-14.

Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*, 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications.

Young, G.W. (2015). Conceptualizing Resistance in Post-Conflict Environments. *International Peacekeeping*, 22(2), 169–185, available: <https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1017081>.